

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Medika I A No. 3 Kota Bogor 16111 Telp. (0251) 8318670 Fax. (0251) 8318670
email : diarpus@kotabogor.go.id, website : <https://diarpus.kotabogor.go.id> .

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pembangunan daerah seiring berakhirnya RPJMD 2019–2024 dan implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025–2026. Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor berkontribusi terutama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan literasi masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan arsip, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan yang mendukung peningkatan akses literasi masyarakat, penguatan tata kelola arsip daerah, transformasi digital kearsipan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Capaian	Kategori
Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	Persentase Perpustakaan Ber-SNP	100,00%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Rata-rata capaian indikator pengelolaan arsip daerah	98,80%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	Rata-rata capaian indikator sasaran	75,00%	Sedang

Sasaran “Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-SNP di Kota Bogor” mencapai kategori Sangat Tinggi dengan capaian 100%. Capaian ini didukung melalui pembinaan perpustakaan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koleksi, serta pengembangan layanan perpustakaan digital dan perpustakaan

keliling. Pada Tahun 2025 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 124.387 kunjungan yang menunjukkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan.

Faktor keberhasilan peningkatan jumlah perpustakaan ber-SNP antara lain dukungan alokasi anggaran yang memadai, efektivitas pembinaan, peningkatan kompetensi SDM, serta komitmen institusi pengelola perpustakaan.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah” mencapai kategori Sangat Tinggi dengan capaian sebesar 98,80%. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan pengelolaan arsip dari aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip inaktif dan statis, serta tingkat digitalisasi arsip. Namun demikian, peningkatan kompetensi SDM kearsipan masih perlu menjadi perhatian karena pengelolaan arsip pada sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi kearsipan yang memadai.

Keberhasilan penyelenggaraan kearsipan didukung oleh komitmen pimpinan perangkat daerah, penerapan sistem kearsipan yang terstandar, dukungan sarana prasarana, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Adapun kendala yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya budaya tertib arsip, keterbatasan anggaran dan infrastruktur digital, serta keterbatasan kompetensi SDM pengelola arsip.

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan” mencapai kategori “Sedang” dengan rata-rata capaian 75%. Penyebab belum optimalnya capaian tersebut adalah belum adanya inovasi perangkat daerah yang mencapai tingkat kematangan di atas 100 dan ditetapkan sebagai inovasi daerah pada Tahun 2025.

Atas kinerja tersebut, pada Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain Akreditasi A untuk Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor; peringkat ke-11 dari 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat dalam Pengawasan Kearsipan Eksternal; serta nilai A (memuaskan) pada hasil Pengawasan Kearsipan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola kearsipan dan layanan perpustakaan yang semakin akuntabel, profesional, dan berbasis digital.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan literasi masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKIP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2025. Melalui penyusunan LKIP ini diharapkan terwujud peningkatan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Bogor, 25 Februari 2026

Kepala,

Taufik S.H
Pembina Utama Muda
Nip. 197108271992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Struktur Organisasi	5
1.5. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.6. Cascading Kinerja	10
1.7. Peta Proses Bisnis	13
1.8. Isu-isu Strategis	15
1.9. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025	16
1.10. Sistematika Penulisan	19
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2026	21
2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025	21
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	22
2.1.3. Indikator Kinerja Utama	27
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
2.3. Rencana dan Alokasi Anggaran Tahun 2025	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2. Realisasi Anggaran	70

3.3.	Analisis Efisiensi.....	74
BAB IV.PENUTUP.....		78
4.1.	Capaian Indikator Kinerja	78
4.2	Permasalahan	79
4.3	Tindak Lanjut Ke Depan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Per Desember 2025	7
Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	17
Tabel 3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025–2026 .	23
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026.....	27
Tabel 5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025	30
Tabel 6. Rencana Belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025	31
Tabel 7. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025	32
Tabel 8. Skala Nilai Perangkat Kinerja	34
Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025.....	34
Tabel 10. Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024–2025	41
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Tahun 2025.....	41
Tabel 12. Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Tahun 2026.....	61
Tabel 13. Kinerja Faktor-Faktor Pembentuk Pencapaian Nilai SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025	64
Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025.....	71
Tabel 15. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025	72
Tabel 16. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	6
Gambar 2. Komposisi Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Berdasarkan Kelompok Usia per 31 Desember 2025	8
Gambar 3. Komposisi Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025	9
Gambar 4. Cascading Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam Mendukung Tujuan I RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026	11
Gambar 5. Cascading Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam Mendukung Tujuan IV RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026	12
Gambar 6. Peta Proses Bisnis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor..	14
Gambar 7. Tren Capaian Indikator Persentase Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan (SNP) Tahun 2021-2024	38
Gambar 8. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor Tahun 2025	39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya. LKIP ini sekaligus menjadi instrumen pengukuran capaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja pada akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang terukur dan sistematis.

Penyusunan LKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 dan memuat informasi kinerja secara sistematis, meliputi capaian indikator kinerja, analisis keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang ditempuh.

Melalui penyusunan LKIP ini diharapkan terwujud akuntabilitas kinerja yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor pada masa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk

penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Tahun 2025 adalah untuk menyajikan tingkat ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, menggambarkan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja, menilai efisiensi pemanfaatan anggaran, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2025;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 171 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

1.4. Struktur Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam perannya sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan berperan dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan yang terseleksi, relevan, dan mutakhir. Sementara itu, sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, termasuk penampungan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kearsipan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

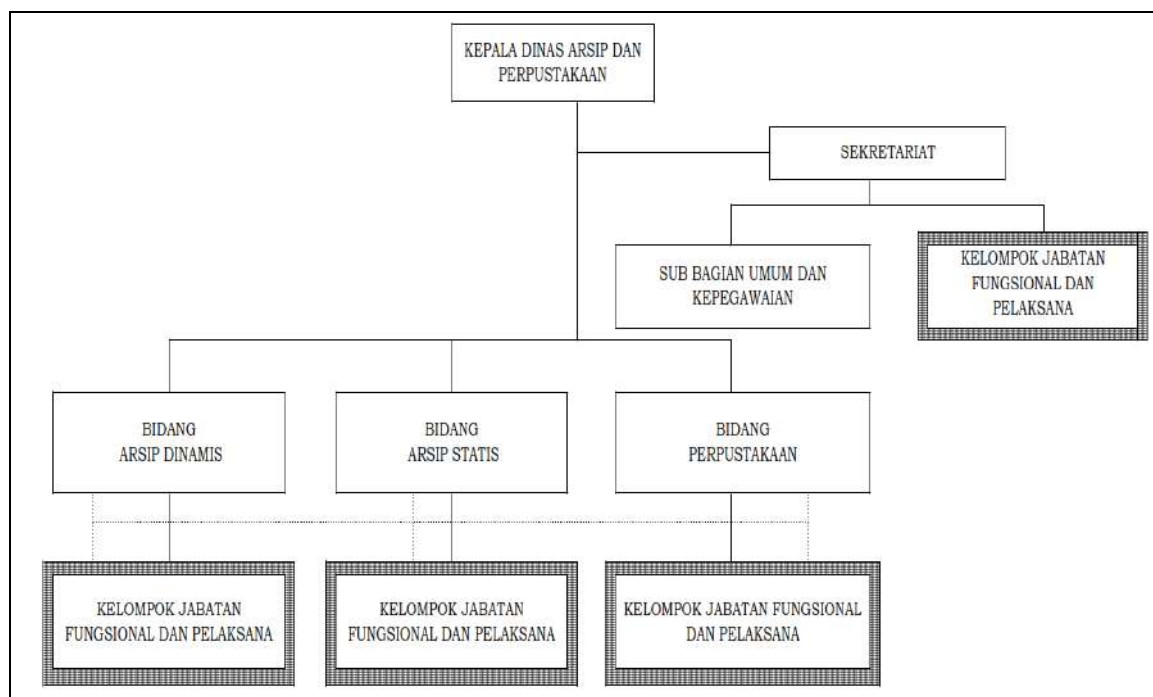
1. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adapun pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor ditetapkan

dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Arsip Dinamis, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Arsip Statis, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Perpustakaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Sumber : Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119)

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

1.5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor sampai akhir tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 50 (lima puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK Paruh Waktu, dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan: S-2 sebanyak 5 orang, S-1 sebanyak 20 orang, D-3 sebanyak 6 orang, dan SMA/Sederajat sebanyak 16 orang, dan SD sebanyak 3 orang.
- Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan II sebanyak 1 orang, Golongan V sebanyak 1 orang, Golongan IX sebanyak 1 orang dan PPPK Paruh Waktu 19 orang.
- Jumlah pegawai menurut jabatan: Struktural sebanyak 5 orang, Fungsional Umum 28 orang, dan Fungsional Tertentu sebanyak 17 orang.
- Jumlah pegawai struktural menurut eselon, yaitu jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, jabatan Eselon III sebanyak 3 orang, jabatan Eselon IV sebanyak 1 orang, dan Non Eselon sebanyak 45 orang.
- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 23 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang.

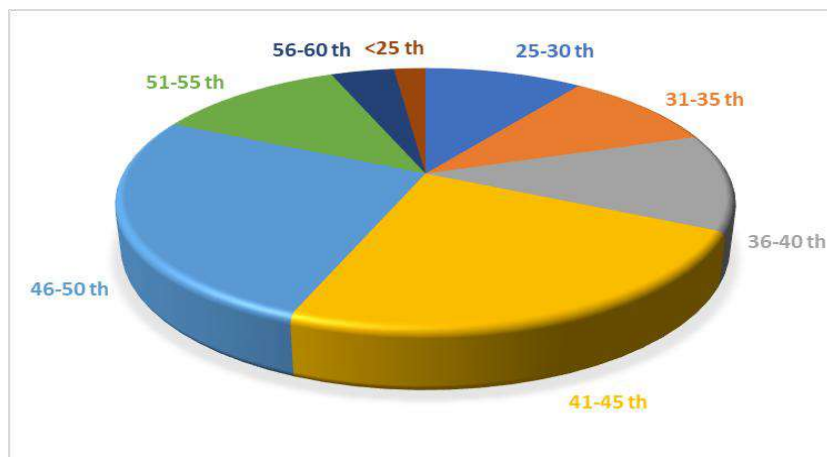
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Per Desember 2025

GOLONGAN	Jenis Kelamin	ESELON									Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Total
		Ia	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Va			
PPPK PW	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
II/c	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/a	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
III/c	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3

GOLONGAN	Jenis Kelamin	ESELON									Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Total
		Ia	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Va			
III/d	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	P	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	8
IV/a	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	P	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
IV/b	L	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IX	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		-	-	-	1	1	2	1	-	-	17	28	50

Sumber : SIMPEG Kota Bogor diolah, 2025

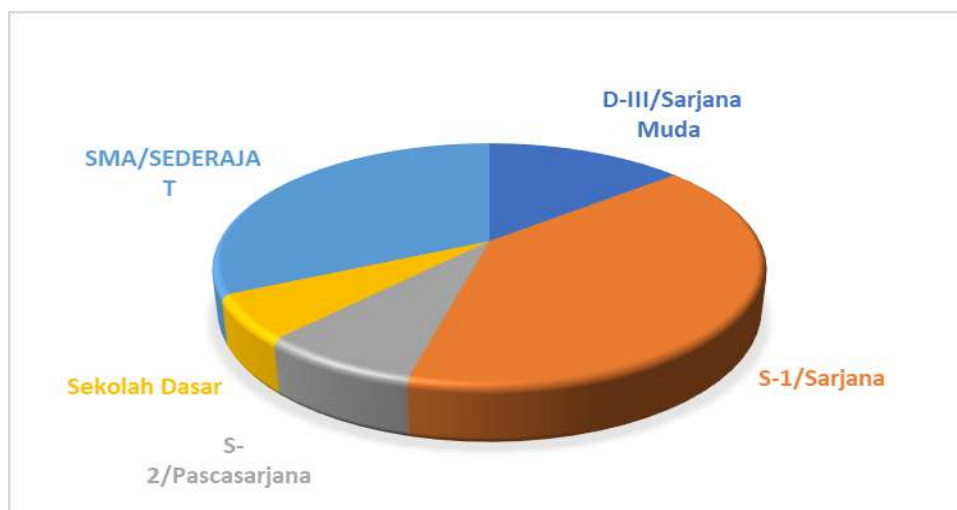
Berdasarkan komposisi usia pegawai, sebagian besar SDM Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor berada pada usia produktif menengah ke atas, terutama pada rentang usia 41–50 tahun yang mencapai sekitar 50% dari total pegawai. Sementara itu, jumlah pegawai usia muda (≤ 35 tahun) masih relatif sedikit, yaitu sekitar 22%, dan pegawai yang mendekati masa pensiun (≥ 51 tahun) sebesar 16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi didukung oleh pegawai yang berpengalaman sehingga kinerja layanan relatif stabil. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam hal regenerasi dan potensi berkurangnya pengetahuan ketika pegawai senior memasuki masa pensiun.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Berdasarkan Kelompok Usia per 31 Desember 2025

Dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, kondisi ini menjadi penting untuk diperhatikan. Pengalaman pegawai senior menjadi kekuatan dalam menjaga kualitas layanan dan pengelolaan arsip. Namun, keterbatasan jumlah pegawai muda dapat berdampak pada kecepatan inovasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan pengembangan layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyiapkan regenerasi, meningkatkan kemampuan pegawai, serta memastikan adanya transfer pengetahuan agar kualitas layanan tetap terjaga dan terus berkembang.

Selain usia, kualitas SDM juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai. Sebagian besar pegawai sudah memiliki pendidikan menengah hingga tinggi, dengan dominasi pada jenjang S-1/sarjana sebesar 40%, diikuti SMA/ sederajat sebesar 32% dan Diploma III sebesar 14%. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan S-2 masih terbatas (8%), dan masih terdapat pegawai dengan pendidikan dasar (6%).



Gambar 3. Komposisi Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan SDM sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas. Namun demikian, peningkatan kapasitas tetap diperlukan, baik melalui pelatihan maupun pendidikan lanjutan, agar pegawai semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan mampu memberikan layanan perpustakaan dan kearsipan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.6. Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran sasaran strategis perangkat daerah ke dalam sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan secara berjenjang guna memastikan keterkaitan serta kontribusi setiap level kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan cascading kinerja dilakukan untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, serta pengukuran kinerja perangkat daerah.

Melalui cascading kinerja, setiap sasaran dan indikator kinerja dapat ditelusuri keterkaitannya mulai dari tujuan perangkat daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja terkait. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja organisasi menjadi lebih terarah, terukur, efektif, dan akuntabel sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun cascading kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran strategis, program, sasaran program, dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah.

TUJUAN RPD	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
INDIKATOR TUJUAN 1 RPD	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Indeks Pembangunan Keluarga	
SASARAN RPD	Meningkatnya kualitas pendidikan	
INDIKATOR SASARAN RPD	1. Indeks Pendidikan	
TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	
	Pengampu : KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya kualitas layanan dan pembinaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Meningkatnya inventarisasi dan pelestarian naskah kuno daerah
INDIKATOR PROGRAM	1.Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1) 2.Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2) 3.Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3) 4.Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) 5.Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5) 6.Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6) 7.Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	Persentase Potensi naskah kuno yang diinventarisasi
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	Pengampu : KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	Pengampu : KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

Gambar 4. Cascading Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam Mendukung Tujuan I RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026

TUJUAN RPD	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
INDIKATOR TUJUAN 1 RPD	Indeks Reformasi Birokrasi				
SASARAN RPD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif				
INDIKATOR SASARAN RPD	1. NILAI SAKIP TINGKAT KOTA 2. Tingkat Maturitas SPIP		3. Opini BPK		4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
TUJUAN RENSTRA	Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Kualitas Pengelolaan Arsip		1. Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah		2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah
SASARAN RENSTRA	Optimalisasi Pengelolaan Arsip Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	1. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan 2. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan 3. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif 4. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis 5. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan 6. Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah		1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	2. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	3. Persentase tindakan lanjut hasil pemeriksaan BPK/Itda 4. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah
	Pengampu : KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN				
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup Perangkat Daerah		Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Audit Kearsipan Bernilai Minimal "Baik"		1. Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja 3. Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja 4. Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	5. Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi 6. Persentase pengampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan secara tepat waktu 7. Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah 8. Persentase Kepatuhan Anggaran 9. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA 10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana 2. Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan SDM 3. Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan 4. Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Pengampu : KEPALA BIDANG ARSIP STATIS DAN KEPALA BIDANG ARSIP DINAMIS		Pengampu : SEKRETARIS DINAS		

Gambar 5. Cascading Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam Mendukung Tujuan IV RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026

1.7. Peta Proses Bisnis

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

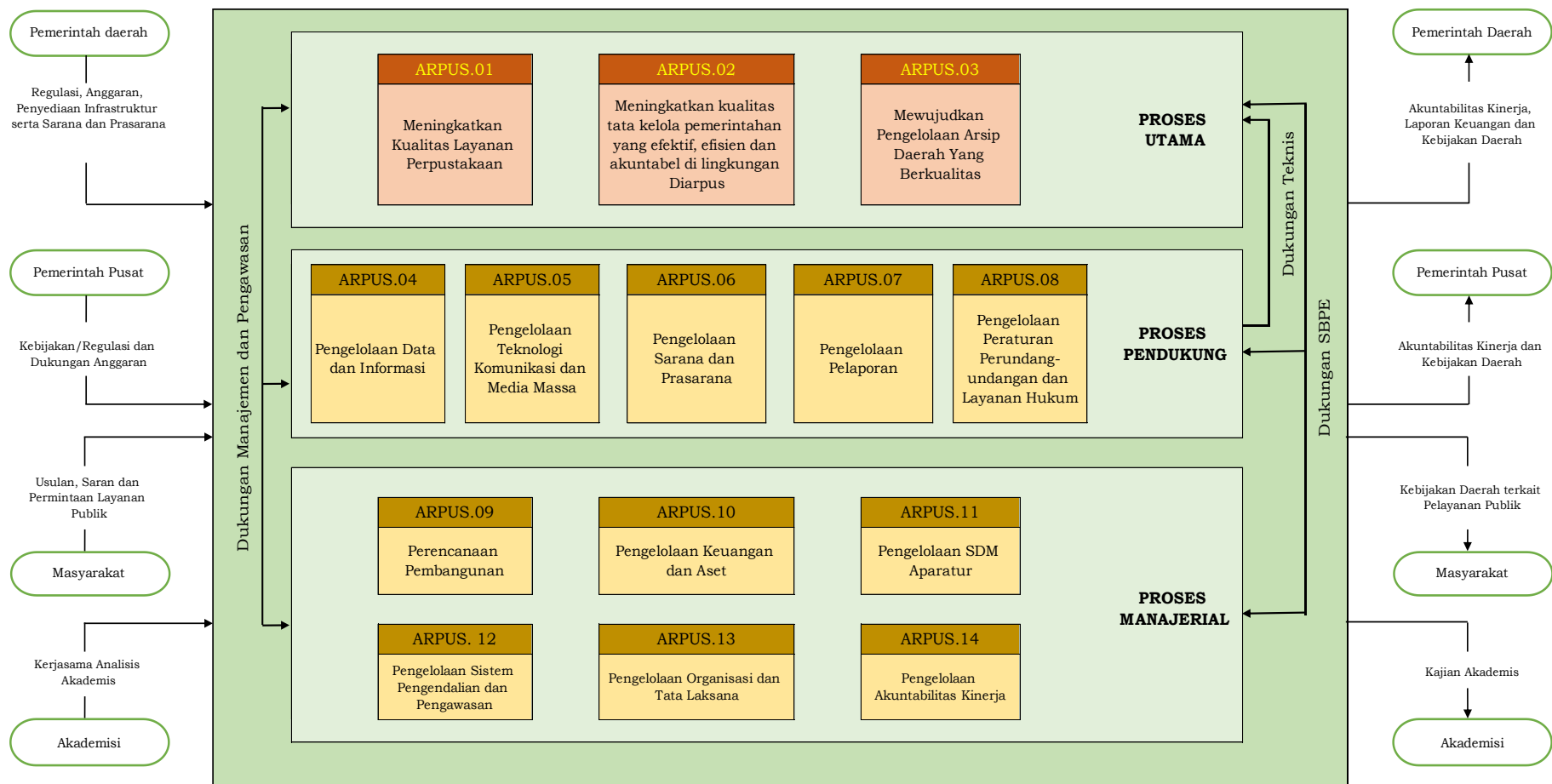
Penyusunan peta proses bisnis bertujuan untuk:

- (1) memastikan instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- (2) memudahkan komunikasi, baik kepada pihak internal maupun eksternal, mengenai proses bisnis dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi; serta
- (3) menyediakan aset pengetahuan organisasi yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan proses bisnis secara rinci sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

Adapun manfaat penyusunan peta proses bisnis antara lain:

- (1) mempermudah identifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan proses kerja sehingga upaya penyempurnaan dapat dilakukan secara lebih terarah; dan
- (2) menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga kualitas pelaksanaan tugas dapat lebih terjaga dan terkendali.

Peta proses bisnis di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Nomor 188.4/662/SEKRET/Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Peta proses bisnis tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Nomor 188.4/662/SEKRET/Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

Gambar 6. Peta Proses Bisnis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

1.8. Isu-isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, terdapat beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan sebagai berikut:

Urusan Kearsipan

1. Perkembangan transformasi digital pemerintahan menuntut pengelolaan arsip yang lebih modern melalui penerapan arsip elektronik dan aplikasi SRIKANDI, namun implementasinya masih memerlukan penguatan sarana, SDM, dan tata kelola.
2. Pengelolaan arsip pada perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan kearsipan dan mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia kearsipan, khususnya tenaga arsiparis, masih belum merata pada perangkat daerah sehingga memengaruhi kualitas pengelolaan arsip.
4. Sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar masih perlu ditingkatkan untuk mendukung preservasi, keamanan, dan penyelamatan arsip daerah.
5. Risiko kerusakan dan kehilangan arsip akibat faktor lingkungan, bencana, maupun keterbatasan sistem pengamanan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan arsip daerah.
6. Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi, memori kolektif daerah, dan bahan pendukung pengambilan kebijakan masih perlu dioptimalkan.
7. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan.

Urusan Perpustakaan

1. Pengembangan budaya literasi dan minat baca masyarakat masih menjadi tantangan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Perpustakaan dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang lebih inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi informasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
3. Pemerataan akses layanan perpustakaan masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan perpustakaan yang mudah dijangkau.
4. Ketersediaan koleksi dan bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas layanan perpustakaan.
5. Kompetensi dan kapasitas SDM pengelola perpustakaan masih perlu dikembangkan guna mendukung pengelolaan perpustakaan yang berkualitas.
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih perlu didorong pada berbagai jenis perpustakaan.
7. Peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, literasi, dan pemberdayaan masyarakat masih perlu diperkuat..

1.9. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Dinas Arsip dan Perpustakaan telah melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025, berdasarkan surat Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor: 700/14/VII-LHE/2025/Itda tanggal 04 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Rekomendasi LHE 2025	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Bukti Eviden	Link Eviden
1.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar seluruhnya dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mendapatkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Melampirkan dokumen evaluasi kinerja RKPD per triwulan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Laporan evaluasi kinerja RKPD per triwulan tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1t7hdmAV9iPdmyAP_9EYtzyhhlvnF7th4
2.	Agar seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan pendukung pakta integritas	Melampirkan dokumen Pakta Integritas tahun 2025 yang telah ditandatangani seluruh pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dokumen Pakta Integritas Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1hFkDacG510HwVckLM7y1veZrxqMuHlc-
3.	Agar Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian reward and punishment	Melampirkan Dokumen pemberian reward dan Punishment pegawai Dinas Arsip Perpustakaan semester 1 Tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dokumen tahapan pemberian reward ASN terbaik semester 1 dan Surat Teguran pegawai semester 1 Dinas Arsip dan Perpustakaan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NxwvzPO_5eKyQzgk6Z5zqUs8Px82hgjq
4.	Data kinerja yang dikumpulkan agar mendukung capaian kinerja yang diharapkan, terlihat dari indikator kinerja Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran dalam Perjanjian Kinerja agar seluruhnya dilakukan pengukuran capaian kinerjanya	Melampirkan Dokumen perjanjian Kinerja Eselon II, eselon III, eselon IV, JFP dan Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1klU6UZ4JKNyOYGGHI0dB4lemeEHJEB1Z

No	Rekomendasi LHE 2025	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Bukti Eviden	Link Eviden
5.	Agar dilakukan revidi atas Laporan kinerja yang dilaporkan	Membuat Dokumen revidi atas Laporan kinerja yang dilaporkan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Matriks Review atas Laporan kinerja yang dilaporkan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dNzxXpk_rkJFSwWWYVGm_9P-QILst36n
6.	Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis indikator kinerja atas Program/Kegiatan yang mendukung sasaran dalam Perjanjian Kinerja	Membuat Dokumen laporan kinerja tentang analisis indikator kinerja atas Program/Kegiatan yang mendukung sasaran dalam Perjanjian Kinerja	Dinas Arsip dan Perpustakaan	laporan kinerja tentang analisis indikator kinerja atas Program/Kegiatan yang mendukung sasaran dalam Perjanjian Kinerja	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kpv7hhDjyIMpeq4zRIBnENWY_eyLqbb
7.	Agar dibentuk Tim Evaluasi Internal atas pelaporan kinerja, yang didukung dengan kompetensi yang memadai	Membuat SK Kepala Dinas Tim Evaluasi Internal atas pelaporan kinerja, yang didukung dengan kompetensi yang memadai	Dinas Arsip dan Perpustakaan	SK Kepala Dinas Tim Evaluasi Internal atas pelaporan kinerja, yang didukung dengan kompetensi yang memadai	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VzJGuvCT4GMCCTpTP1irl3OoPnFwZOIE

Sumber : Berita Acara Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

1.10. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sumber Daya Manusia (SDM)
- 1.6. Cascading Kinerja
- 1.7. Peta Proses Bisnis
- 1.8. Isu-isu strategis
- 1.9. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP
- 1.10. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2025-2026
 - 2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025
 - 2.1.2. Tujuan dan sasaran
 - 2.1.3. Indikator kinerja utama
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Target kinerja
 - Indikator dan satuan ukur
- 2.3. Rencana dan Alokasi Anggaran Tahun 2025
 - Ringkasan pagu dan distribusi program

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

- Perbandingan target dan realisasi
- Analisis capaian per sasaran strategis
- Faktor pendukung dan factor penghambat

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.3. Realisasi Anggaran

- Serapan anggaran
- Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

BAB IV. PENUTUP

4.1. Capaian Indikator Kinerja

4.2. Permasalahan

4.3. Tindak Lanjut Ke Depan

- Rekomendasi dan langkah perbaikan ke depan

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2026

2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

Periode penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026 merupakan tahap akhir pelaksanaan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005–2025, yaitu fase Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pemantapan hasil pembangunan periode sebelumnya sekaligus penguatan daya saing daerah guna mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005–2025 adalah “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah.” Visi ini mengandung makna bahwa Kota Bogor diarahkan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi sektor jasa yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat, dengan kondisi kota yang bersih, indah, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki kualitas hidup yang tinggi yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta didukung oleh pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik melalui pelayanan prima dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi berbasis jasa: Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor jasa yang efisien, produktif, dan berdaya saing, guna mendorong kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan: Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, aman, dan berwawasan lingkungan melalui penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, berorientasi pelayanan publik, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan supremasi hukum.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;
3. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya, penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2026 mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan provinsi yang masih berlaku sehingga arah kebijakan dan strategi pembangunan tetap selaras secara vertikal maupun horizontal.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Arsip dan Perpustakaan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026 melalui penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 1 dan Tujuan 2 RPD sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Kontribusi tersebut bersifat sektoral dan dilaksanakan secara sinergis bersama perangkat daerah lainnya dalam mendukung pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra perangkat daerah merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian indikator makro

pembangunan daerah yang mencerminkan kemajuan pembangunan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Indikator makro tersebut merupakan dampak (*impact*) dari pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor, sehingga pencapaiannya memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Keterkaitan antara tujuan RPD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah selanjutnya dirumuskan secara sistematis dalam Tabel 3. Penyajian tujuan dan sasaran pada tabel berikut menggunakan struktur tujuan dan sasaran dalam Renstra perangkat daerah. Penomoran tujuan dapat berbeda dengan RPD, namun secara substansi tetap selaras karena masing-masing tujuan telah dipetakan sesuai keterkaitan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025–2026

Tujuan RPD 2025-2026	Sasaran RPD 2025-2026	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
						2025	2026
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,7	79,35
	Meningkatnya kualitas Pendidikan			Indeks Pendidikan	Indeks	76,17	77,19
		Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Kategori	71,41 (Sedang)	74,41 (Sedang)
			Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	19,02	19,51
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	A
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif			Nilai AKIP Tingkat Kota	Skor	A	A
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Indeks	98	98,5

Tujuan RPD 2025-2026	Sasaran RPD 2025-2026	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
						2025	2026
		Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas		Kualitas Pengelolaan Arsip	Kategori	83 (Memuaskan)	84 (Memuaskan)
			Optimalisasi pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	29	29,5
				Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	16	16,5
				Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	6	6,5
				Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	13	13,5
				Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	17,5	18
				Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	70 (Sangat Tinggi)	75 (Sangat Tinggi)
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Predikat	A	A
				Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,55	3,57
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83,2	83,3
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ittda	Persen	91	92
				Kepatuhan Pengelolaan keuangan	Persen	95	95
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi/tahun/ PD	≥1	≥1

Tujuan RPD 2025-2026	Sasaran RPD 2025-2026	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	
						2025	2026
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah	Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,75	89,25

Sumber : Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor 2025-2026, diolah

Tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025–2026 disusun selaras dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Tahun 2025-2026.

Tujuan 1 RPD “Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing” dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dijabarkan ke dalam tujuan perangkat daerah “Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat” dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Hal ini karena literasi menjadi dasar penting dalam meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat. Peningkatan literasi akan mendorong peningkatan kualitas manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM.

Selanjutnya, tujuan 2 RPD “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dijabarkan ke dalam dua tujuan perangkat daerah, yaitu “Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas” dan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas”. Kedua tujuan ini saling mendukung dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik mendukung tertib administrasi, ketersediaan informasi, dan akuntabilitas. Sementara itu, peningkatan tata kelola dan pelayanan publik yang diukur melalui SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan peningkatan kinerja dan kualitas layanan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Sasaran perangkat daerah merupakan turunan dari sasaran dalam RPD yang lebih operasional dan spesifik pada urusan kearsipan dan perpustakaan, serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan perangkat daerah.

Keterkaitan antara sasaran 1 RPD “Meningkatnya kualitas pendidikan” dengan indikator Indeks Pendidikan dan sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kuantitas perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor” dengan indikator persentase perpustakaan ber-SNP bersifat saling mendukung. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh ketersediaan perpustakaan sebagai sarana belajar. Perpustakaan ber-SNP memiliki standar layanan, koleksi, dan SDM yang lebih baik sehingga meningkatkan akses dan kualitas sumber belajar. Hal ini berdampak pada peningkatan literasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Selanjutnya, sasaran 2 RPD “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” dengan indikator Nilai AKIP tingkat kota, Opini BPK, dan IPKP dijabarkan ke dalam tiga sasaran perangkat daerah, yaitu: (1) Optimalisasi Pengelolaan Arsip Daerah; (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah; dan (3) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah.

Optimalisasi pengelolaan arsip daerah menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital. Arsip yang tertata baik, baik fisik maupun digital, menghasilkan data dan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini didukung oleh aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip inaktif dan statis, SDM kearsipan, serta digitalisasi arsip.

Peningkatan kualitas pengelolaan arsip berdampak pada efisiensi kerja, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan Nilai AKIP, Opini BPK, dan IPKP.

Sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang diukur melalui SAKIP, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepatuhan pengelolaan keuangan juga mendukung peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada AKIP dan Opini BPK.

Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencerminkan kualitas layanan yang

diterima masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan IPKP serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Indikator dalam Renstra perangkat daerah merupakan turunan dari indikator RPD yang disusun lebih teknis dan dapat dikendalikan oleh perangkat daerah, seperti ketersediaan arsip, hasil audit kearsipan, dan indeks kepuasan layanan perpustakaan. Dengan demikian, capaian perangkat daerah berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja pembangunan daerah.

Dengan keterkaitan tersebut, terdapat benang merah yang jelas antara RPD dan Renstra perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025–2026. Indikator tersebut mencerminkan capaian kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan serta aspek tata kelola pemerintahan yang menjadi bagian dari penilaian kinerja perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dimaksud disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Sumber Data	Penanggung Jawab
		Uraian Indikator	Formula	Satuan		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Berdasarkan data Perpustnas: $\left(\frac{\text{Jumlah Perpustakaan Ber-SNP}}{\text{Jumlah Perpustakaan Ber-NPP}} \right) \times 100\%$ Keterangan: SNP = Standar Nasional Perpustakaan NPP = Nomor Pokok Perpustakaan	Persen	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Kepala Bidang Perpustakaan
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai rata-rata hasil pengawasan kearsipan internal	40% Nilai LAKI + 60% Nilai LAKE Keterangan : LAKI : Laporan Audit Kearsipan Internal LAKE : Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Nilai	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kepala Bidang Arsip Statis dan Dinamis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Sumber Data	Penanggung Jawab
		Uraian Indikator	Formula	Satuan		
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Bogor Nilai LAKE Aspek Pembinaan = $\left(\frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Nilai standar}} \times 100\% \right) \times 20\%$ Keterangan : 20% adalah bobot aspek	Nilai	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kepala Bidang Arsip Statis dan Dinamis
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Bogor Nilai LAKE Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif = $\left(\frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Nilai standar}} \times 100\% \right) \times 10\%$ Keterangan : 10% adalah bobot aspek	Nilai		
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Bogor Nilai LAKE Aspek Pengelolaan Arsip Statis = $\left(\frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Nilai standar}} \times 100\% \right) \times 20\%$ Keterangan : 20% adalah bobot aspek	Nilai		
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Bogor Nilai LAKE Aspek SDM Kearsipan = $\left(\frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Nilai standar}} \times 100\% \right) \times 20\%$ Keterangan : 20% adalah bobot aspek	Nilai		
		Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai APAE (Audit Pengelolaan Arsip Elektronik) : Nilai LAKE aspek kebijakan + ((Nilai perolehan APAE ÷ nilai standar) x 70%)	Nilai		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Diarpus Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja Bobot : 30%	Kategori	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sekretaris
			Pengukuran Kinerja Bobot : 30%			
			Pelaporan Kinerja Bobot : 15%			
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bobot : 25%			
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) x 100%	Persen		
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Sumber Data	Penanggung Jawab
		Uraian Indikator	Formula	Satuan		
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	proses pembaruan, penemuan, atau pengembangan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Inovasi dapat berupa produk, jasa, metode, atau sistem pada Perangkat Daerah	Inovasi		

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bogor, Nomor 000.8.6.3/013-Diarpus Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bogor

Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan pada tabel di atas mengacu pada SK IKU perangkat daerah yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Tahun 2025 terdapat penyesuaian indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan sesuai hasil evaluasi dan penyelarasan cascading kinerja perangkat daerah.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja perangkat daerah sekaligus menjadi dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang IKU. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyesuaian sasaran, indikator, dan target kinerja melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan penyelarasan kinerja perangkat daerah.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sampai dengan akhir tahun anggaran. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja perangkat daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	4,92
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	12,8
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	19
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	7,63
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	17
6.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	17,33
7.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	70
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/Ittda	Persen	100
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	88,75*

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor 2025

Catatan : *) Pada Tahun 2025 target dan realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disajikan dalam bentuk nilai konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan skala 0–100 sesuai ketentuan pengukuran yang berlaku. Penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi indikator, melainkan hanya bentuk penyajian nilai pengukuran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diimplementasikan ke dalam 4 (empat) program sebagai berikut:

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pengelolaan Arsip

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.3. Rencana dan Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan memperoleh alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 11.427.086.681,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 10.874.169.181,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), dan Belanja Modal sebesar Rp 552.917.500,00 (lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Rincian anggaran disajikan pada Tabel 6:

Tabel 6. Rencana Belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	BELANJA OPERASI	10.874.169.181,00
1.1.	Belanja Pegawai	7.462.787.357,00
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.411.381.824,00

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
2.	BELANJA MODAL	552.917.500,00
2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.176.300,00
2.2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	259.741.200,00
	TOTAL ANGGARAN BELANJA	11.427.086.681,00

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk pencapaian sasaran strategis disajikan pada Tabel 7:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis PD	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	918.834.400,00	8,04	- Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	359.344.600,00	3,14	Program Pengelolaan Arsip
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	10.148.907.681,00	88,81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Total		11.427.086.681,00	100	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor telah melaksanakan pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Wali Kota Bogor Tahun 2025. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Dalam rangka menjamin objektivitas penilaian capaian kinerja, digunakan skala nilai peringkat kinerja.

Skala nilai peringkat kinerja digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian target indikator kinerja. Peringkat kinerja tersebut menggambarkan kategori capaian kinerja mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi, berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja tersebut, capaian masing-masing indikator kinerja dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi kinerja, serta mengidentifikasi indikator yang telah mencapai target maupun yang masih memerlukan upaya peningkatan.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap capaian masing-masing indikator kinerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025, dengan membandingkan antara target dan realisasi yang telah dicapai. Analisis ini juga dilengkapi dengan penjelasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja. Analisis capaian kinerja ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor pada tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 11 (sebelas) indikator telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berikut disajikan rincian realisasi masing-masing indikator.

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025

No.	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Perpustakaan Ber- Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	4,92	4,92	100,00	Sangat Tinggi
2.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	12,8	13,64	106,56	Sangat Tinggi

No.	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
3.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	19	23,47	123,53	Sangat Tinggi
4.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	7,63	8	104,85	Sangat Tinggi
5.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	17	21,41	125,94	Sangat Tinggi
6.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	17,33	16,08	92,79	Sangat Tinggi
7.	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	70	87,09	124,41	Sangat Tinggi
8.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (84,2)	A (85,7)	100,00	Sangat Tinggi
9.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ITDA	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	88,75	90,67	102,16	Sangat Tinggi
11.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1	0	0,00	Sangat Rendah
Rata-rata Tingkat Ketercapaian					90,25	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU), 9 (sembilan) indikator berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator belum mencapai target. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Selanjutnya, diperlukan analisis terhadap masing-masing indikator untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada periode berikutnya.

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan yang sesuai standar serta mendukung penguatan budaya literasi.

Pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian metode pengukuran indikator Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyesuaian tersebut menyebabkan perubahan target kinerja dari 19,02% sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2025–2026 menjadi 4,92% sesuai metode pengukuran pada Perjanjian Kinerja Perubahan. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya karena menggunakan basis perhitungan yang berbeda.

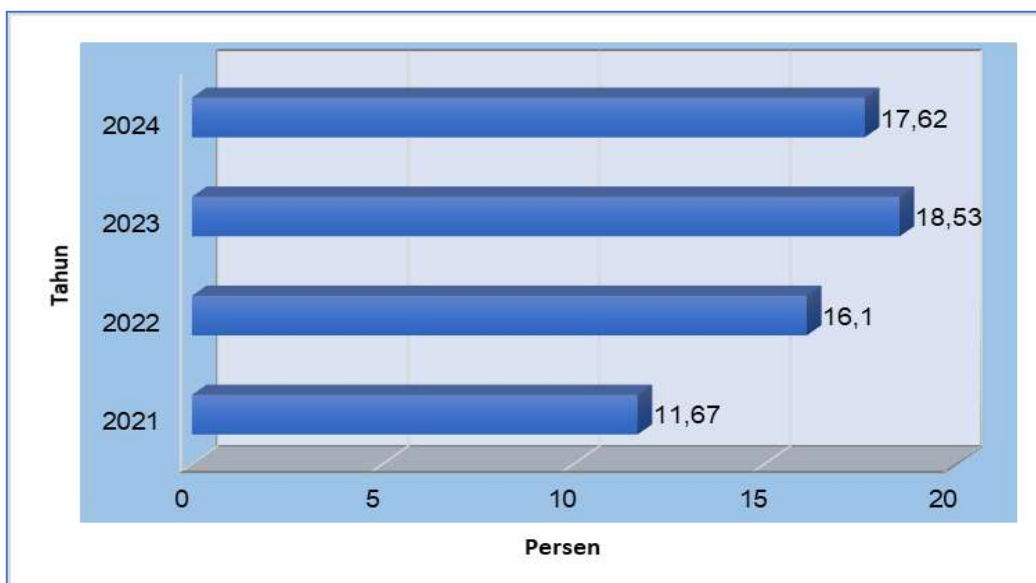


Berdasarkan metode pengukuran pada periode berjalan, realisasi indikator Tahun 2025 mencapai 4,92% atau 100% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan standardisasi perpustakaan telah berjalan sesuai target kinerja tahun berjalan. Adapun, perbandingan dengan capaian nasional belum dapat dilakukan karena data nasional untuk indikator Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Tahun 2025 belum tersedia pada saat penyusunan laporan ini.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 6,12%, maka capaian Tahun 2025 telah mencapai 80,39% dari target jangka menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan perpustakaan berada pada jalur pencapaian target Renstra (on track), meskipun masih terdapat gap sebesar 1,20 poin yang perlu menjadi perhatian hingga akhir periode perencanaan.

Meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Tahun 2025, data historis Tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa indikator Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Capaian meningkat dari 11,67 pada Tahun 2021 menjadi 18,53 pada Tahun 2023, namun menurun menjadi 17,62 pada Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemenuhan standar perpustakaan belum berlangsung secara konsisten sehingga masih diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan perpustakaan secara berkelanjutan.

Grafik tren capaian indikator Persentase Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan (SNP) tahun 2021-2024 disajikan pada Gambar 7.



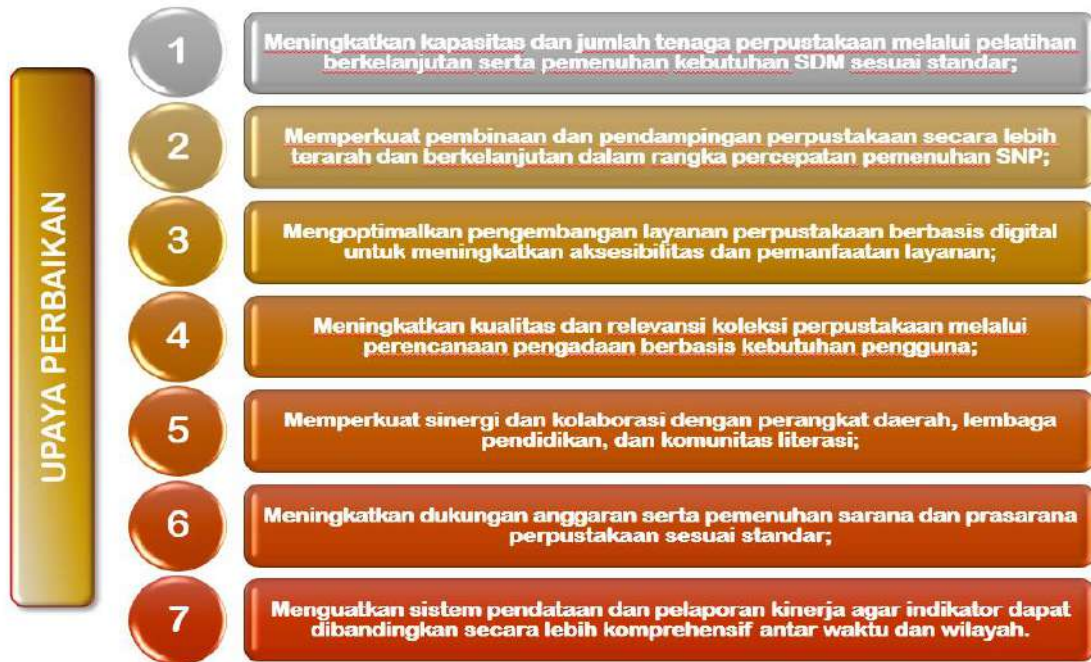
Gambar 7. Tren Capaian Indikator Persentase Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan (SNP) Tahun 2021-2024

Pelaksanaan sasaran ini didukung melalui Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Program Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan perpustakaan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan koleksi, serta pengembangan layanan perpustakaan. Sementara itu, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mendukung penguatan layanan informasi melalui pelestarian koleksi bernilai budaya dan historis.

Pengembangan layanan perpustakaan seperti layanan digital, otomasi keanggotaan, perpustakaan keliling, layanan akhir pekan, dan Spot Baca Digital turut meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan perpustakaan pada Tahun 2025 sebanyak 124.387 kunjungan atau rata-rata 433 pengunjung per hari.

Keberhasilan peningkatan jumlah perpustakaan ber-SNP didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, efektivitas pembinaan, peningkatan kompetensi SDM, serta komitmen kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, variasi kapasitas pengelola perpustakaan, belum optimalnya kompetensi SDM, serta belum meratanya penerapan otomasi dan integrasi layanan perpustakaan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, telah dirumuskan beberapa langkah perbaikan sebagaimana tercantum dalam infografis berikut.



Atas kinerja yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Arsip dan Peprustakaan Kota Bogor berhasil meraih Akreditasi A Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor.



Gambar 8. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor Tahun 2025

Pada Tahun 2026, Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) ditargetkan sebesar 5,16 sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2029.

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Realisasi anggaran indikator kinerja utama (IKU) di atas mencapai 96,94%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 918.834.400,00 terealisasi sebesar Rp 890.762.512,00.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah” diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui penguatan kebijakan, pembinaan, pengembangan SDM kearsipan, pengelolaan arsip, serta penerapan digitalisasi arsip guna mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berbasis informasi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertib arsip dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, transformasi digital kearsipan, serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor menyelenggarakan workshop aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), sosialisasi penilaian dan audit kearsipan internal, serta pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pencapaian sasaran diukur melalui indikator yang mencerminkan tingkat kematangan penyelenggaraan kearsipan pada aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip inaktif dan statis, SDM kearsipan, serta digitalisasi arsip daerah.

Pada Tahun 2025 terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja seiring implementasi Renstra 2025–2026, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024–2025

Tahun 2024	Tahun 2025
Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis Kota Bogor	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah
Indikator: Nilai rata-rata hasil pengawasan kearsipan internal	Indikator: 1. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan 2. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan 3. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif 4. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis 5. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan 6. Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah

Perubahan ini bertujuan memberikan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan kearsipan daerah. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Tahun 2024.

Meskipun demikian, pengukuran kinerja Tahun 2025 tetap dilakukan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan kearsipan daerah pada masing-masing aspek pengelolaan arsip. Capaian indikator kinerja utama sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Tahun 2025

No.	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	12,8	13,64	106,56
2	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	19	23,47	123,53
3	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	7,63	8	104,85

No.	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
4	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	17	21,41	125,94
5	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	17,33	16,08	92,79
6	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	70	87,09	124,41

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, mayoritas indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator pada aspek SDM kearsipan masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Adapun analisis capaian masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

1. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan

Indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan kearsipan daerah yang meliputi regulasi, pedoman, SOP, serta dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kearsipan.



Pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 12,8 dengan realisasi sebesar 13,64 sehingga capaian kinerja mencapai 106,56%. Capaian

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kearsipan daerah telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Tahun 2024 karena pada Tahun 2024 pengukuran masih menggunakan indikator agregat berupa Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan Internal. Pada Tahun 2025, indikator telah diuraikan menjadi beberapa aspek pengelolaan arsip sehingga metode pengukuran mengalami penyesuaian dan indikator ini ditetapkan sebagai indikator baru dalam Renstra 2025–2026.

Namun demikian, apabila dilihat secara indikatif dari nilai agregat pengukuran sebelumnya, terdapat peningkatan dari 12,55 pada Tahun 2024 menjadi 13,64 pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 1,09 poin. Kenaikan ini dapat dimaknai sebagai sinyal awal adanya penguatan pengelolaan kearsipan, khususnya terkait optimalisasi regulasi dan implementasi kebijakan kearsipan yang mulai menunjukkan perbaikan.

Dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara metodologis, tren nilai tersebut tetap dapat digunakan sebagai gambaran awal (baseline indikatif) terhadap arah perbaikan kinerja pengelolaan kearsipan..

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 14,05, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 13,64 telah mencapai 97,08% dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan arsip aspek kebijakan telah mendekati target akhir periode Renstra sehingga diperlukan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas implementasi kebijakan kearsipan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 13,77, realisasi Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 13,64 masih berada di bawah capaian provinsi dengan selisih 0,13 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan arsip pada aspek kebijakan perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan capaian tingkat provinsi.

Pencapaian indikator didukung oleh penyusunan dan implementasi regulasi kearsipan, penguatan koordinasi pengelolaan arsip, serta pembinaan penerapan tata kelola kearsipan pada perangkat daerah. Selain itu, pelaksanaan

pengawasan kearsipan internal terhadap 35 perangkat daerah turut mendorong peningkatan kepatuhan dan penerapan kebijakan kearsipan pada perangkat daerah.

Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Arsip, khususnya kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota serta kegiatan pembinaan dan sosialisasi kearsipan. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 28 perangkat daerah memperoleh kategori “Baik” sehingga persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib dan baku mencapai 80%.

Hasil pengawasan kearsipan internal tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 000.5.2/KEP.358-Diarpus/2025 tentang Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Faktor-faktor pendukung maupun penghambat pencapaian indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- Telah tersusunnya regulasi, pedoman, dan SOP kearsipan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan arsip secara sistematis.
- Adanya komitmen dan dukungan pimpinan perangkat daerah dalam penerapan kebijakan kearsipan. Adanya dukungan pimpinan perangkat daerah dalam menjadikan pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penyelenggaraan kearsipan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penetapan petugas pengelola arsip dan penyusunan SOP pengelolaan arsip dinamis.
- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kearsipan antar perangkat daerah.
- Dilaksanakannya sosialisasi, pembinaan, dan monitoring implementasi kebijakan kearsipan secara berkala.

Faktor Penghambat/Kendala

- Masih terdapat perangkat daerah yang belum memahami dan mengimplementasikan regulasi kearsipan secara optimal.
- Belum seluruh perangkat daerah memiliki SOP dan instrumen pengelolaan arsip yang sesuai ketentuan.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan kearsipan.
- Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian dokumen dan mekanisme kerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring, secara berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap tata kelola kearsipan.

2. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan

Indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah.



Pada Tahun 2025 target indikator sebesar 19 dengan realisasi sebesar 23,47 sehingga capaian kinerja mencapai 123,53%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kearsipan telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Indikator ini pada Tahun 2024 diukur menggunakan pendekatan indikator agregat berupa Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, sedangkan pada Tahun 2025 pengukuran telah diuraikan menjadi beberapa aspek pengelolaan arsip. Perbedaan struktur indikator tersebut menyebabkan capaian antar tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung karena menggunakan metodologi pengukuran yang berbeda.

Namun demikian, meskipun menggunakan metode pengukuran yang berbeda, terdapat kecenderungan peningkatan nilai pada aspek pembinaan dari 18,68 pada Tahun 2024 menjadi 23,47 pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 4,79 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan pembinaan kearsipan di lingkungan perangkat daerah melalui peningkatan intensitas monitoring, evaluasi, pendampingan, serta implementasi kebijakan kearsipan. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan arsip sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas tata kelola kearsipan daerah.

Selain itu, pada kegiatan sosialisasi juga disampaikan hasil pengawasan kearsipan internal sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan tata kelola arsip pada masing-masing perangkat daerah.

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap 35 (tiga puluh lima) perangkat daerah dengan rata-rata nilai sebesar 67,78 atau termasuk kategori “Baik”. Ruang lingkup pengawasan kearsipan meliputi Aspek Kebijakan, Aspek Pembinaan, Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif, Aspek Pengelolaan Arsip Statis, dan Aspek Sumber Daya Kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor sebagai Lembaga Kearsipan Daerah menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pencapaian indikator penyelenggaraan kearsipan daerah.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 21,5, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 23,47 telah mencapai 109,16% dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembinaan kearsipan telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan kearsipan pada perangkat daerah.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 25, realisasi Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 23,47 masih berada di bawah capaian provinsi dengan selisih 1,53 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kearsipan masih memerlukan penguatan untuk mencapai capaian yang setara dengan tingkat provinsi.

Pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip, khususnya kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis serta kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga pembinaan dapat menjangkau perangkat daerah secara lebih luas dan efektif melalui monitoring, evaluasi, pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop kearsipan.

Kegiatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis SRIKANDI bagi admin perangkat daerah, Sosialisasi Arsip Terjaga Tahun 2025, serta Workshop Pemberkasan Arsip Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI. Kegiatan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dinamis maupun arsip elektronik.

Faktor-faktor pendukung maupun penghambat pencapaian indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan kearsipan kepada perangkat daerah secara rutin dan berkelanjutan;
- Meningkatnya partisipasi dan komitmen perangkat daerah dalam mengikuti kegiatan pembinaan serta pengelolaan arsip sesuai ketentuan;

- Tersedianya instrumen evaluasi, monitoring, dan pengawasan kearsipan internal yang mendukung proses pembinaan dan tindak lanjut perbaikan tata kelola arsip, dan
- Dukungan anggaran, koordinasi, dan pengawasan yang memadai dalam pelaksanaan pembinaan kearsipan.

Faktor Penghambat/Kendala

- Keterbatasan jumlah tenaga pembina kearsipan dibandingkan jumlah perangkat daerah yang dibina;
- Belum meratanya pemahaman aparaturnya terhadap tata kelola arsip;
- Keterbatasan anggaran sehingga frekuensi pembinaan belum optimal; dan
- Belum terjaminnya keberlanjutan penugasan pegawai yang menangani fungsi kearsipan pada perangkat daerah, sehingga penerapan hasil pembinaan dan pengelolaan arsip secara berkesinambungan belum optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan melalui peningkatan intensitas monitoring, pendampingan, dan sosialisasi pengelolaan arsip.

3. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif

Indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.

Pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 7,63 dengan realisasi sebesar 8 sehingga capaian mencapai 104,85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif telah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI JAWA BARAT



Indikator ini pada Tahun 2024 diukur menggunakan pendekatan indikator agregat berupa Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, sedangkan pada Tahun 2025 pengukuran telah diuraikan menjadi beberapa aspek pengelolaan arsip. Perbedaan struktur indikator tersebut menyebabkan capaian antar tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung karena menggunakan metodologi pengukuran yang berbeda.

Namun demikian, meskipun menggunakan metode pengukuran yang berbeda, terdapat kecenderungan peningkatan nilai pada aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dari 7,38 pada Tahun 2024 menjadi 8 pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 0,62 poin. Meskipun peningkatan yang terjadi relatif kecil, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan arsip inaktif, khususnya pada penataan, penyimpanan, dan pengendalian arsip sesuai ketentuan kearsipan yang berlaku.

Peningkatan capaian tersebut juga mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam mendukung tertib arsip di lingkungan perangkat daerah

sehingga pengelolaan arsip inaktif menjadi lebih sistematis dan mudah diakses saat diperlukan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 8,88, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 8 telah mencapai 90,09% dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan optimalisasi dalam penataan, penyimpanan, dan penyusutan arsip agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 8, realisasi Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 8 menunjukkan capaian yang setara dengan tingkat provinsi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan arsip inaktif telah dilaksanakan sesuai standar capaian provinsi

Pencapaian indikator didukung oleh kegiatan penataan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip pada Record Center Kota Bogor yang menyimpan sekitar 52.151 berkas arsip dari perangkat daerah. Pemeliharaan arsip dilakukan melalui peremajaan sarana simpan arsip, fumigasi, serta alih media arsip inaktif sebanyak 9.957 lembar menjadi format digital PDF. Selain itu, telah dilaksanakan pemusnahan arsip milik Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 7.000 berkas sesuai ketentuan penyusutan arsip. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengelolaan Arsip, khususnya kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip yang dilaksanakan secara efektif guna menjaga keamanan dan keberlangsungan arsip daerah.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan, seperti rak arsip, boks arsip, ruang penyimpanan, dan record center yang memadai dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan arsip.
- Pelaksanaan penataan, pemindahan, dan penyusutan arsip sesuai jadwal retensi arsip.
- Adanya penerapan klasifikasi arsip dan daftar arsip inaktif secara tertib.
- Meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam penyerahan arsip inaktif.

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan depo arsip dan fasilitas penyimpanan arsip inaktif.
- Masih terdapat arsip yang belum tertata sesuai kaidah kearsipan.
- Belum optimalnya pelaksanaan penyusutan arsip pada perangkat daerah akibat belum optimalnya penerapan Jadwal Retensi Arsip (JRA), sehingga masih terjadi penumpukan arsip inaktif pada unit pengolah maupun Record Center.
- Keterbatasan SDM dan sarana pendukung pengelolaan arsip inaktif. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan optimalisasi pemanfaatan ruang penyimpanan arsip serta peningkatan pelaksanaan penyusutan dan alih media arsip secara bertahap.

4. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis

Indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip statis melalui kegiatan akuisisi, preservasi, pengolahan, dan pemanfaatan arsip statis.



Pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 17 dengan realisasi sebesar 21,41 sehingga capaian kinerja mencapai 125,94%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip statis telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Indikator ini pada Tahun 2024 diukur menggunakan pendekatan indikator agregat berupa Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, sedangkan pada Tahun 2025 pengukuran telah diuraikan menjadi beberapa aspek pengelolaan arsip. Perbedaan struktur indikator tersebut menyebabkan capaian antar tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung karena menggunakan metodologi pengukuran yang berbeda.

Namun demikian, meskipun menggunakan metode pengukuran yang berbeda, terdapat kecenderungan peningkatan nilai pada aspek Pengelolaan Arsip Statis dari 16,64 pada Tahun 2024 menjadi 21,41 pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 4,77 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya pengelolaan arsip statis, khususnya dalam pelaksanaan akuisisi, preservasi, pengolahan, dan penyediaan akses arsip statis.

Peningkatan capaian juga mengindikasikan adanya penguatan tata kelola arsip permanen sebagai memori kolektif daerah yang memiliki nilai guna kesejarahan, akuntabilitas, dan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip statis telah dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan..

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 19,5, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 21,41 telah mencapai 109,79% dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip statis telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan peningkatan kualitas pelaksanaan akuisisi, preservasi, dan layanan arsip statis daerah.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 30, realisasi Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 21,41 masih berada di bawah capaian provinsi dengan selisih 8,59 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip statis masih memerlukan optimalisasi, khususnya dalam pelaksanaan akuisisi, preservasi, dan layanan arsip statis.

Pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip, khususnya kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain workshop penyusunan sarana temu balik arsip statis sebanyak dua kali dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dispusipda Jawa Barat. Selain itu, telah disusun berbagai sarana bantu temu balik arsip statis berupa inventaris arsip, daftar arsip statis, dan guide khasanah arsip statis guna mempermudah penelusuran arsip.

Dalam mendukung pelestarian memori kolektif daerah, Bidang Arsip Statis juga melaksanakan reproduksi arsip bertema “Bogor Tempo Dulu” sebanyak 140 item serta penelusuran dan akuisisi arsip Covid-19 pada beberapa perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Dilaksanakannya akuisisi, preservasi, dan layanan arsip statis secara bertahap.
- Tersedianya inventaris arsip statis dan sarana preservasi arsip.
- Adanya koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyerahan arsip statis.
- Meningkatnya upaya pelestarian memori kolektif daerah.

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Belum optimalnya penyerahan arsip statis dari pencipta arsip.
- Keterbatasan sarana preservasi dan ruang penyimpanan arsip statis.
- Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan arsip statis.
- Sebagian arsip belum teridentifikasi nilai guna sekundernya.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan pembinaan dan koordinasi secara berkelanjutan kepada perangkat daerah terkait penyerahan arsip statis serta optimalisasi pengelolaan ruang penyimpanan arsip.

5. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan

Indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan digunakan untuk mengukur kapasitas dan kompetensi SDM kearsipan dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan arsip daerah.

Pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 17,33 dengan realisasi sebesar 16,08 sehingga capaian kinerja mencapai 92,79%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target indikator belum tercapai secara optimal meskipun berbagai upaya peningkatan kapasitas SDM telah dilaksanakan.



Indikator ini pada Tahun 2024 diukur menggunakan pendekatan indikator agregat berupa Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan Internal, sedangkan pada Tahun 2025 pengukuran telah diuraikan menjadi beberapa aspek pengelolaan arsip. Perbedaan struktur indikator tersebut menyebabkan capaian antar tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung karena menggunakan metodologi pengukuran yang berbeda.

Namun demikian, meskipun menggunakan metode pengukuran yang berbeda, terdapat penurunan nilai pada aspek SDM Kearsipan dari 17,08 pada Tahun 2024 menjadi 16,08 pada Tahun 2025 atau menurun sebesar 1 poin. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM kearsipan masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi, pemerataan kemampuan pengelola arsip, maupun kesesuaian penempatan SDM dengan tugas dan fungsi kearsipan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 18,58, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 16,08 telah mencapai 86,54% dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SDM kearsipan telah mengalami kemajuan, namun masih diperlukan upaya peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan untuk mencapai target akhir Renstra.

Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 19,25, realisasi Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 16,08 masih berada di bawah capaian provinsi dengan selisih 3,17 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi serta pemenuhan SDM kearsipan masih perlu diperkuat guna mendukung pengelolaan arsip yang lebih optimal.

Pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip, khususnya melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM kearsipan berupa bimbingan teknis, workshop, dan sosialisasi yang melibatkan arsiparis, pengelola arsip, serta admin SRIKANDI perangkat daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM dalam pengelolaan arsip konvensional maupun elektronik. Selain itu, penempatan pengelola arsip yang semakin diarahkan sesuai tugas dan fungsi serta dukungan pimpinan terhadap pengembangan kompetensi SDM turut mendukung peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah.

Faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan terdiri dari faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor pendukung pencapaian indikator

- Adanya upaya peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi kearsipan;
- Penempatan pengelola arsip yang semakin diarahkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- Meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengelolaan arsip yang tertib; dan
- Dukungan pimpinan dalam mendorong pengembangan kompetensi SDM kearsipan.

Namun demikian, capaian indikator belum optimal dan belum memenuhi target yang ditetapkan, terutama disebabkan oleh **faktor penghambat**., antara lain:

- Keterbatasan jumlah arsiparis dan SDM yang memiliki kompetensi kearsipan pada perangkat daerah;
- Belum optimalnya penempatan dan pemanfaatan SDM yang menangani fungsi kearsipan, sehingga pengelolaan arsip belum terlaksana secara konsisten dan efektivitas pembinaan kearsipan belum optimal; dan
- Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM kearsipan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan, bimbingan teknis, pendampingan, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah.

6. Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah

Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah digunakan untuk mengukur tingkat penerapan digitalisasi arsip dalam mendukung modernisasi tata kelola kearsipan daerah. Digitalisasi arsip dilakukan guna mendukung efisiensi penyimpanan, kemudahan akses informasi, dan keamanan arsip daerah.



Pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 70 dengan realisasi sebesar 87,09 sehingga capaian kinerja mencapai 124,41%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi arsip daerah telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penerapan digitalisasi arsip dalam mendukung modernisasi tata kelola kearsipan daerah. Digitalisasi arsip dilakukan guna mendukung efisiensi penyimpanan, kemudahan akses informasi, dan keamanan arsip daerah.

Pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 70 dengan realisasi sebesar 87,09 sehingga capaian kinerja mencapai 124,41%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi arsip daerah telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Meskipun pada Tahun 2024 indikator Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah belum ditetapkan sebagai IKU, data capaian telah tersedia sehingga perbandingan kinerja tetap dapat dilakukan. Capaian indikator Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, dari 68,75 menjadi 87,09 atau meningkat sebesar 18,34 poin. Kondisi tersebut menggambarkan adanya

peningkatan implementasi pengelolaan arsip berbasis elektronik dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan daerah.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 80, maka realisasi Tahun 2025 sebesar 87,09 telah mencapai 108,86% dari target akhir Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi arsip daerah telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya penerapan pengelolaan arsip berbasis digital dalam mendukung tata kelola kearsipan yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, realisasi Kota Bogor Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi, karena ketiadaan data.

Pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip, khususnya kegiatan alih media arsip inaktif sebanyak 9.957 lembar menjadi format digital PDF serta peningkatan penggunaan aplikasi SRIKANDI melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop pemberkasan arsip elektronik. Selain itu, implementasi sistem kearsipan elektronik turut mendukung percepatan transformasi digital dalam pengelolaan arsip daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Implementasi klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAA), serta penggunaan aplikasi SRIKANDI yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan transformasi digital kearsipan.
- b. Adanya dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip digital.
- c. Tersedianya perangkat pendukung seperti scanner, server, dan aplikasi pengelolaan arsip elektronik.
- d. Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan transformasi arsip digital.
- e. Dilaksanakannya digitalisasi arsip prioritas secara bertahap dan terencana.

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- a. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kapasitas penyimpanan data.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan arsip digital antar perangkat daerah.
- c. Keterbatasan SDM yang menguasai digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik.
- d. Belum optimalnya implementasi aplikasi SRIKANDI dan sistem kearsipan elektronik akibat keterbatasan perangkat pendukung, kapasitas pengguna, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi.
- e. Volume arsip yang cukup besar sehingga proses digitalisasi membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi kearsipan elektronik, peningkatan kapasitas pengelolaan arsip digital, serta penguatan implementasi sistem kearsipan elektronik secara bertahap.

Secara keseluruhan, hasil capaian indikator pengelolaan arsip daerah menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam rangka optimalisasi tata kelola kearsipan daerah.

Oleh karena itu, beberapa upaya perbaikan dan tindak lanjut strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah disajikan pada infografis berikut.



Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara berkelanjutan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor menetapkan target Tahun 2026 yang mengacu pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2029.

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa indikator telah melampaui target Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi capaian organisasi lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal, sehingga target yang telah ditetapkan sebelumnya perlu diselaraskan dengan perkembangan capaian aktual agar tetap relevan dan memberikan dorongan bagi perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Atas dasar tersebut, dilakukan penyesuaian pada target Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan, Aspek Pembinaan, Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif, Aspek Pengelolaan Arsip Statis, serta Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah dengan mempertimbangkan capaian aktual, tren perkembangan kinerja, dan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan program serta kegiatan pendukung. Sementara itu, target Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan tetap dipertahankan karena masih sesuai dengan kapasitas sumber

daya manusia yang tersedia. Perubahan target tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Tahun 2026

No.	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	
			Renstra 2025-2029	Penyesuaian
1.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	13,05	13,66
2.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	19,5	23,49
3.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	7,88	8,2
4.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	17,5	21,43
5.	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	17,58	17,58
6.	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	72	87,11

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi, khususnya pada area penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran ini diukur melalui empat indikator, yaitu: Predikat SAKIP Perangkat Daerah, Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat Daerah, Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat kematangan inovasi di atas 100, serta Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Perangkat Daerah.

Keempat indikator tersebut mencerminkan penguatan tata kelola internal Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam kerangka Reformasi Birokrasi, yang mencakup aspek akuntabilitas kinerja, kepatuhan terhadap hasil

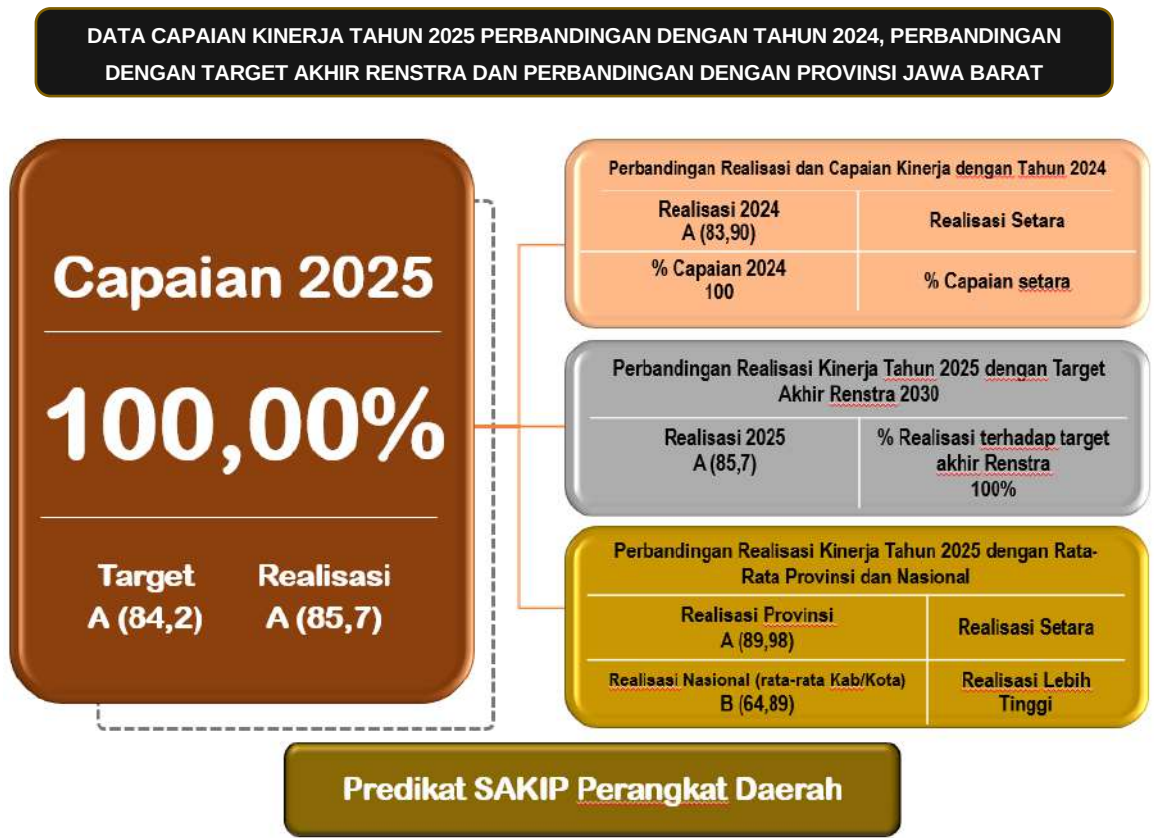
pengawasan, inovasi pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Selanjutnya, capaian kinerja dari masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut.

1. **Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

Predikat SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi/perangkat daerah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Predikat SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 adalah A (Memuaskan) dari target A, atau mencapai 100,00%. Predikat tersebut diperoleh berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 85,7, yang berada pada rentang nilai 80–90 untuk predikat A. Capaian nilai tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target sebesar 84,2, atau mencapai 101,78% dari target yang ditetapkan.



Capaian tersebut menunjukkan bahwa:

- Sistem perencanaan kinerja telah selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi
- Pengukuran kinerja telah berjalan baik dan konsisten
- Pelaporan dan evaluasi kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan
- Namun masih terdapat ruang penguatan, terutama pada orientasi hasil (outcome) serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 83,90 menjadi 85,70 atau meningkat sebesar 1,80 poin.

Peningkatan nilai terjadi pada beberapa komponen penilaian, yaitu Perencanaan Kinerja dari 26,10 menjadi 27,00, Pengukuran Kinerja dari 25,80 menjadi 26,10, serta Pelaporan Kinerja dari 12,75 menjadi 13,35. Sementara itu, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tetap pada nilai 19,25.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya penerapan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pelaporan kinerja secara terukur dan sistematis.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 telah mencapai 99,70% terhadap target akhir Renstra 2030 sebesar 85,95, atau masih terdapat selisih 0,25 poin.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah berada pada jalur yang baik menuju target jangka menengah, namun masih diperlukan penguatan agar target akhir dapat tercapai secara optimal.

Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor mencapai 85,70, setara dengan rata-rata Kota Bogor (85,70). Meskipun

demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (89,98) dengan selisih 4,28 poin. Di sisi lain, nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional (64,89) dengan selisih 20,81 poin.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor telah berada pada kategori A (Memuaskan), setara dengan rata-rata Kota Bogor dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kategori B (Baik). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan sebesar 4,28 poin terhadap rata-rata Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, terutama pada aspek perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Kinerja faktor-faktor pembentuk pencapaian Nilai SAKIP, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Kinerja Faktor-Faktor Pembentuk Pencapaian Nilai SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025

No	Faktor Pembentuk	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,01	27	99,96
2.	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	26,55	26,1	98,31
3.	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	12,48	13,35	106,97
4.	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	21,97	19,25	87,62
5.	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	100	100	100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa aspek pengukuran kinerja dan evaluasi internal masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencapaian target Nilai SAKIP di lingkup Dinas Arsip dan Perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, terukur, serta didukung oleh data yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan. Monitoring capaian dilaksanakan secara berkala guna memastikan konsistensi antara target dan realisasi serta mendeteksi deviasi secara dini.

Penguatan evaluasi internal dilakukan melalui analisis yang lebih mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja, disertai penyusunan tindak lanjut yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan dan penetapan kinerja periode berikutnya, sehingga sistem akuntabilitas kinerja dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi.

Pada Tahun 2026, indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan mencapai kategori A dengan nilai 85,75 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2029.

2. Jumlah Inovasi yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 100)

Indikator jumlah inovasi merupakan indikator baru yang digunakan untuk menggambarkan upaya peningkatan kualitas layanan melalui pendekatan inovatif. Pada Tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 0 (nol) dari target ≥ 1 inovasi per tahun per perangkat daerah (0%). Karena merupakan indikator baru, capaian tersebut belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun pelaporan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor telah menyelenggarakan inovasi di Bidang Perpustakaan, yaitu Layanan Jam Buka Sabtu dan Minggu yang telah ditetapkan sebagai inovasi daerah dengan tingkat kematangan 57. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah batas minimal 100 poin yang dipersyaratkan, sehingga target 1 (satu) inovasi yang memenuhi kriteria belum tercapai.



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematangan inovasi dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, kejelasan proses pelaksanaan, dukungan sumber daya, kelengkapan bukti implementasi dan dampak, mekanisme evaluasi berkelanjutan, serta potensi replikasi.

Ditinjau dari perspektif jangka menengah, capaian Tahun 2025 masih sebesar 0% terhadap target akhir Renstra Tahun 2030, yaitu 6 inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kematangan inovasi perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan berikutnya agar inovasi yang dikembangkan dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Adapun perbandingan dengan capaian nasional tidak dapat dilakukan karena indikator jumlah inovasi yang memenuhi kriteria merupakan indikator spesifik yang hanya digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pada Tahun 2026, indikator Jumlah Inovasi yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 100) ditargetkan sebanyak 1 inovasi sesuai Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2029.

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

Pada Tahun 2025, capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Daerah (Itida) mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Indikator ini merupakan ukuran terhadap tingkat kepatuhan dan respons perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan maupun rekomendasi pengawasan. Capaian yang tinggi menunjukkan semakin baiknya tata kelola pemerintahan, pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian indikator ini menunjukkan kondisi yang tetap stabil, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dipertahankan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Ditinjau dari perspektif jangka menengah, capaian Tahun 2025 telah memenuhi target akhir Renstra sebesar 100%, yang merupakan target maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilaksanakan secara optimal. Capaian ini perlu dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun mendatang guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan transparan.

Perbandingan dengan rata-rata nasional tidak dapat dilakukan karena indikator ini merupakan indikator spesifik daerah yang hanya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Pada Tahun 2026, indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Daerah (Itda) ditargetkan 100% sesuai dengan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2029.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Hasil pengukuran IKM digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kualitas pelayanan publik serta menjadi dasar dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan secara berkelanjutan.

Pengukuran IKM dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan dengan menilai berbagai unsur pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Pengukuran menggunakan skala indeks yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai SKM skala 25–100 sesuai pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.



Pada Tahun 2025 diperoleh nilai konversi SKM sebesar 90,67 atau melampaui target sebesar 88,75 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,16%.

Dibandingkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 85,26, capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,41 poin. Data hasil survei Tahun 2024 digunakan sebagai baseline dalam menganalisis perkembangan kualitas pelayanan, meskipun pada tahun tersebut indikator IKM belum ditetapkan secara formal dalam dokumen kinerja perangkat daerah.

Target akhir Renstra Tahun 2030 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disajikan dalam skala indeks 1–4, sedangkan realisasi Tahun 2025 menggunakan nilai konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam skala 25–100 sesuai ketentuan pengukuran yang berlaku. Oleh karena itu, target akhir Renstra sebesar 3,628 terlebih dahulu dikonversi ke dalam skala 0–100 sehingga setara dengan nilai 90,70.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, realisasi indikator Tahun 2025 sebesar 90,67 telah mencapai 99,97% terhadap target akhir Renstra Tahun 2030 sebesar 90,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah pada dasarnya telah memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra, meskipun masih terdapat selisih yang sangat kecil sebesar 0,03 poin dari target akhir.

Adapun perbandingan dengan rata-rata nasional tidak dapat dianalisis karena belum tersedia data pembandingan nasional yang relevan dan sebanding dengan karakteristik layanan yang diukur pada perangkat daerah.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Tahun 2025 lebih dominan dilakukan terhadap pengguna layanan perpustakaan. Oleh karena itu, tingginya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terutama didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan melalui pengembangan layanan digital, otomasi keanggotaan, layanan perpustakaan keliling, layanan akhir pekan, serta penyediaan Spot Baca Digital. Selain itu, keramahan dan responsivitas petugas, kemudahan akses layanan, serta ketersediaan koleksi dan fasilitas baca turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kepuasan pengguna perpustakaan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain belum meratanya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat, keterbatasan koleksi pada tema tertentu, serta perlunya peningkatan kenyamanan dan optimalisasi sarana pendukung pada waktu kunjungan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan perpustakaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pada Tahun 2026, target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Perangkat Daerah disesuaikan dari 3,57 menjadi 3,65. Penyesuaian tersebut dilakukan karena capaian kinerja Tahun 2025 telah melampaui target Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025–2029.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Kota Bogor dengan total pagu sebesar Rp 11.427.086.681,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp 10.860.944.868,00 atau sebesar 95,05% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Adapun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp 566.141.813,00 atau 4,95% dari total pagu anggaran belanja.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebagian besar berasal dari efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pengadaan barang/jasa, serta penyesuaian kebutuhan belanja pada saat pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025

No.	Uraian Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	593.225.600,00	568.436.402,00	95,82
	1. Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.225.600,00	568.436.402,00	95,82
2.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	325.608.800,00	322.326.110,00	98,99
	1. Kegiatan : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	325.608.800,00	322.326.110,00	98,99
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	359.344.600,00	356.314.725,00	99,16
	1. Kegiatan : Pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	274.984.600,00	272.144.725,00	98,97
	2. Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	84.360.000,00	84.170.000,00	99,77
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.148.907.681,00	9.613.867.631,00	94,73
	1. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.844.100,00	16.844.100,00	100
	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.521.793.157,00	7.102.298.244,00	94,42
	3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.729.900,00	265.180.815,00	96,88
	4. Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	293.176.300,00	291.221.300,00	99,33
	5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.328.897.324,00	1.234.284.832,00	92,88
	6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.466.900,00	704.038.340,00	98,54
JUMLAH TOTAL		11.427.086.681,00	10.860.944.868,00	95,05

Berdasarkan realisasi belanja tersebut, akuntabilitas keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Pengelompokan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	SiLPA (Rp.)	Tingkat Realisasi (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	918.834.400,00	890.762.512,00	28.071.888,00	96,94	3,06
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	359.344.600,00	356.314.725,00	3.029.875,00	99,16	0,84
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	10.148.907.681,00	9.613.867.631,00	535.040.050,00	94,73	5,27
Jumlah Total		11.427.086.681,00	10.860.944.868,00	566.141.813,00	95,05	4,95

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi dengan tetap menyisakan efisiensi anggaran pada akhir tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada umumnya telah mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan target kinerja perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut

dilaksanakan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian indikator sasaran pada urusan perpustakaan, kearsipan, dan tata kelola perangkat daerah. Keterkaitan antara sasaran strategis dengan program pendukung disajikan pada tabel berikut

Tabel 16. Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Program Pendukung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Realisasi Anggaran (Rp.)	Kontribusi Program terhadap Sasaran
1.	Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Program Pembinaan Perpustakaan	568.436.402,00	Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pemenuhan standar perpustakaan pada perpustakaan binaan di Kota Bogor
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	322.326.110,00	Mendukung penguatan layanan dan pelestarian koleksi perpustakaan sebagai bagian dari peningkatan mutu perpustakaan daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	• Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan • Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan • Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif • Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis • Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan • Tingkat Digitalisasi	Program Pengelolaan Arsip	356.314.725,00	Mendukung pelaksanaan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta digitalisasi arsip daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Realisasi Anggaran (Rp.)	Kontribusi Program terhadap Sasaran
		Arsip Daerah			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	• Predikat SAKIP Perangkat Daerah • Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA • Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.613.867.631,00	Mendukung penyelenggaraan tata kelola perangkat daerah, administrasi pemerintahan, pelayanan umum, dan peningkatan akuntabilitas kinerja

3.3. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Efisiensi tercermin apabila target kinerja dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal sehingga masih terdapat sisa anggaran pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran efisiensi dalam dokumen ini dilakukan pada tingkat sasaran strategis karena pelaksanaan program dan kegiatan mendukung lebih dari satu indikator kinerja secara terintegrasi. Oleh karena itu, penggunaan anggaran tidak dapat dipisahkan secara spesifik pada masing-masing indikator kinerja. Efisiensi selanjutnya diukur dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan tingkat penggunaan anggaran pada sasaran tersebut.

Tabel berikut menyajikan tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025.

Tabel 17. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata Capaian per Sasaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor	Persentase Perpustakaan Ber- Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	4,92	4,92	100,00	100	3,06
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	12,8	13,64	106,56	98,80	0,84
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	19	23,47	123,53		
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	7,63	8	104,85		
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Statis	Nilai	17	21,41	125,94		
		Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	17,33	16,08	92,79		
		Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	70	87,09	124,41		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (84,2)	A (85,7)	100,00	75,00	5,27
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA	Persen	100	100	100,00		
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1	0	0,00		

No.	Sasaran Strategis PD	IKU PD	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata Capaian per Sasaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	88,75	90,67	102,16		
Rata-rata Tingkat Ketercapaian						90,25		4,95

Pada Sasaran “Meningkatnya Kuantitas Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Kota Bogor”, indikator Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Secara keseluruhan, capaian sasaran ini mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,06%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Pada Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah”, sebagian besar indikator menunjukkan capaian di atas target. Nilai Indeks Pengelolaan Arsip pada aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip statis, serta tingkat digitalisasi arsip daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan mencapai 92,79% atau belum sepenuhnya memenuhi target. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran ini mencapai 98,80% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,84%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung peningkatan kualitas tata kelola kearsipan daerah secara efektif.

Selanjutnya, Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan” mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 75% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,27%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pada sasaran ini belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi capaian kinerja, karena masih terdapat indikator yang belum mencapai target,

khususnya pada indikator jumlah inovasi perangkat daerah yang belum terealisasi pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah sebesar 90,25% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada umumnya telah berjalan cukup efektif dan efisien, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu dioptimalkan pencapaiannya pada tahun berikutnya.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Capaian Indikator Kinerja

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 dilaksanakan mengacu pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari 11 (sebelas) indikator kinerja, sebagian besar menunjukkan capaian baik hingga Sangat Tinggi ($\geq 100\%$), terutama pada aspek pengelolaan arsip dan pelayanan publik. Indikator seperti Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan (106,56%), Aspek Pembinaan (123,53%), Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif (104,85%), Aspek Pengelolaan Arsip Statis (125,94%), dan Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah (124,41%) menunjukkan bahwa transformasi dan penguatan pengelolaan arsip sudah berjalan Sangat Tinggi, bahkan melampaui target. Hal ini juga didukung oleh capaian SAKIP (101,78%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (102,16%) yang menunjukkan peningkatan kinerja dan kualitas layanan.

Indikator Persentase Perpustakaan Ber-SNP (100%) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA (100%) juga tercapai sesuai target, yang menunjukkan stabilitas kinerja pada aspek layanan perpustakaan dan akuntabilitas pengawasan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih di bawah target, yaitu:

1. Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan (92,79%), menunjukkan masih adanya gap dalam kompetensi atau pemenuhan SDM kearsipan.
2. Jumlah inovasi perangkat daerah (0%), yang menunjukkan belum adanya inovasi yang mencapai tingkat kematangan >100 atau belum ada yang ditetapkan.

Secara umum walaupun belum semua indikator kinerja sasaran tercapai memenuhi target yang telah ditetapkan, jika dilihat dari rata-rata pencapaian target kinerja sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 sebesar 90,25% maka rata-rata pencapaian target kinerjanya termasuk dalam kategori tinggi.

Tingkat capaian indikator sasaran tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan di tahun mendatang dapat menyokong tercapainya target indikator sasaran yang sudah ditetapkan.

4.2 Permasalahan

Urusan Kearsipan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
2. Pengamanan ruang depo arsip terhadap potensi bahaya kebakaran masih belum maksimal.
3. Penerapan aplikasi kearsipan dinamis SRIKANDI belum optimal dan masih dalam tahap uji coba.
4. Ketersediaan sumber daya manusia di bidang kearsipan masih terbatas.
5. Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain belum tersedianya pengatur suhu dan kelembaban ruangan, sistem peringatan dini kebakaran (*fire alarm system*), serta sistem keamanan ruang arsip yang memadai. Selain itu, dukungan peralatan seperti komputer (PC) dan scanner untuk kegiatan alih media arsip juga masih terbatas.
6. Ketersediaan boks arsip belum mencukupi untuk menampung sekitar 80.000 arsip inaktif dan statis, sehingga kebutuhan boks arsip masih mengalami kekurangan setiap tahunnya.

7. Hasil pengawasan kearsipan menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah di Kota Bogor belum memiliki arsiparis, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebutuhan SDM oleh instansi yang berwenang.
8. Kesadaran dan pemahaman masyarakat serta Perangkat Daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan.

Urusan Perpustakaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan belum optimal.
2. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masih belum memadai.
3. Koordinasi dalam pemberdayaan perpustakaan belum optimal, sehingga sinergi program dan kegiatan belum tercapai secara maksimal.
4. Jumlah koleksi dan judul buku perpustakaan masih terbatas.
5. Budaya baca masyarakat masih relatif rendah.
6. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan belum optimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan merupakan faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja perangkat daerah. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam perumusan strategi dan langkah perbaikan ke depan.

4.3 Tindak Lanjut Ke Depan

Berdasarkan permasalahan dan upaya yang telah diidentifikasi, diperlukan rencana tindak lanjut sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan, sebagai berikut:

Urusan Kearsipan

1. Menyusun rencana aksi sosialisasi Peraturan Daerah secara terjadwal dan terstruktur kepada seluruh Perangkat Daerah, termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
2. Mengusulkan penganggaran prioritas untuk peningkatan sistem keamanan depo arsip, khususnya pengadaan fire alarm system, alat pemadam kebakaran, dan sistem pengamanan ruang arsip.
3. Menetapkan roadmap implementasi aplikasi SRIKANDI disertai target penerapan pada seluruh Perangkat Daerah secara bertahap.
4. Mengusulkan formasi kebutuhan arsiparis serta mendorong redistribusi atau penugasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan.
5. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar nasional, serta mengusulkan pemenuhannya secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
6. Mengalokasikan pengadaan boks arsip setiap tahun berdasarkan proyeksi penambahan arsip.
7. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan di setiap Perangkat Daerah.
8. Melaksanakan program edukasi dan kampanye sadar arsip kepada masyarakat dan Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

Urusan Perpustakaan

1. Menyusun program peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inovasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengembangkan program peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan secara berkelanjutan.
3. Memperkuat sinergi program perpustakaan melalui forum koordinasi antar pemangku kepentingan.
4. Menyusun rencana pengadaan koleksi buku secara prioritas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Mengembangkan program peningkatan budaya baca masyarakat melalui kegiatan literasi berbasis inklusi sosial.
6. Menyusun rencana pengembangan SDM perpustakaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, sehingga dapat dijadikan acuan.

Bogor, 25 Februari 2026

Kepala,

Taufik S.H
Pembina Utama Muda
Nip. 197108271992031005